



Katalog BPS : 6301003.51

STATISTIK KONSTRUKSI TAHUN 2011

<http://bali.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

STATISTIK KONSTRUKSI 2011

ISBN : 979.473.826.3

No. Publikasi : 51532.1202

Katalog BPS : 6301003.51

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman : 43 halaman

Naskah :

Bidang Statistik Produksi

Gambar Kulit :

Bidang Statistik Produksi

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Dicetak Oleh :

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Sektor konstruksi merupakan sektor ekonomi yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Provinsi Bali. Untuk mengetahui kinerja sektor tersebut dari tahun ke tahun maka Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Tahunan Perusahaan Konstruksi yang dilakukan secara serentak pada perusahaan konstruksi di seluruh Indonesia, termasuk juga di seluruh Provinsi Bali. Data yang dikumpulkan melalui survei ini mencakup berbagai hal mengenai kegiatan yang dilakukan perusahaan konstruksi tersebut.

Publikasi ini menyajikan data Statistik Tahunan Perusahaan Konstruksi yang meliputi karakteristik kegiatan perusahaan konstruksi seperti jumlah perusahaan konstruksi, banyaknya tenaga kerja dan nilai balas jasa pekerja, pendapatan bruto, pengeluaran, serta beberapa jenis data lainnya yang terkait.

Akhirnya pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya kepada para pengusaha dan atau pimpinan perusahaan konstruksi yang berada di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, yang telah membantu kelancaran pelaksanaan Survei Tahunan Perusahaan Konstruksi setiap tahunnya.

Denpasar, September 2012

Kepala BPS Provinsi Bali

Ir. I Gde Suarsa, M.Si

NIP. 19550628 197903 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
I. Pendahuluan	1
II. Tujuan	2
III. Ruang lingkup dan Cakupan Kegiatan	2
IV. Konsep dan Definisi	3
V. Metode Pengumpulan Data	24
VI. Ulasan	25

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Jumlah Perusahaan/Usaha Sektor konstruksi Menurut Bentuk Badan Hukum Provinsi Bali Tahun 2011	25
Tabel 2. Jumlah Sampel Perusahaan/Usaha sektor Konstruksi Menurut Bentuk Badan Hukum Provinsi Bali Tahun 2010 dan 2011	27
Tabel 3. Bidang Pekerjaan Utama Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Provinsi Bali Tahun 2011	29
Tabel 4. Kualifikasi Golongan dari Bidang Pekerjaan Utama Perusahaan/Usaha sektor Konstruksi Provinsi Bali Tahun 2010 dan Tahun 2011	30
Tabel 5. Jumlah tenaga kerja tetap menurut jenis kelamin pada perusahaan/usaha sektor konstruksi Provinsi Bali Tahun 2011	31
Tabel 6. Pengeluaran Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Menurut Jenisnya Provinsi Bali 2011 (000 Rp)	32
Tabel 7. Pendapatan Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Menurut Jenisnya Provinsi Bali tahun 2011 (000 Rp)	33
Tabel 8. Tingkat Efisiensi Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Provinsi Bali Tahun 2011	35
Tabel 9. Persentase Keuntungan Terhadap Pengeluaran Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Provinsi Bali 2011	36

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1. Persentase Populasi Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Menurut Bentuk Badan Hukumnya Tahun 2011	26
Grafik 2. Sampel Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Menurut Bentuk Badan Hukum Tahun 2010	27
Grafik 3. Sampel Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Menurut Bentuk Badan Hukum Tahun 2011	28

<http://bali.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi sekarang ini, perkembangan sektor konstruksi dapat dijadikan tolak ukur dari kemajuan suatu negara. Dalam pembangunan nasional, sektor konstruksi mempunyai peranan sebagai berikut :

- a. Dengan pembangunan berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Pembangunan infrastruktur memungkinkan peningkatan mobilitas masyarakat dan niaga, prasarana sanitasi, kesehatan dan pendidikan serta fungsi-fungsi sosial lainnya menjadi lebih baik.
- c. Sektor konstruksi berperan juga dalam tumbuhkembangnya berbagai sektor lain seperti sektor industri, sektor perdagangan, sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya.

Oleh karena itulah sektor konstruksi memegang peran penting dalam pembangunan nasional sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional disamping memberi peluang kesempatan kerja. Sektor konstruksi digerakkan oleh badan usaha jasa pelaksana konstruksi baik berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum seperti perusahaan/usaha konstruksi nasional maupun asing, perseorangan atau rumah tangga sebagai pelaksana.

Untuk memantau pelaksanaan pembangunan dan mengevaluasi perkembangan sektor konstruksi di Indonesia umumnya dan pada Provinsi Bali khususnya diperlukan data statistik yang aktual dan akurat serta berkesinambungan dalam periode waktu tertentu. Badan Pusat

Statistik sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pengumpulan data sektor konstruksi yang mencakup perusahaan konstruksi berbadan hukum nasional yang berdomisili di wilayah Indonesia. Dalam pengumpulan data dibutuhkan direktori perusahaan konstruksi yang lengkap sebagai frame dalam pengambilan sampel berbagai survei konstruksi. Dengan direktori yang lengkap dapat dilaksanakan pengumpulan data setiap perusahaan yang terkena sampel dengan survei triwulan (VKT-2012) dan survei tahunan konstruksi (VKR-2011).

II. TUJUAN

Tujuan dari pembuatan buku publikasi ini adalah sebagai acuan untuk menyamakan pemahaman konsep dan definisi statistik yang baku sehingga memudahkan bagi masyarakat serta pengguna data di lingkungan BPS dan instansi/lembaga lain.

III. RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN KEGIATAN

Sampel Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi yang dicakup dalam survei ini adalah sebanyak 152 perusahaan/usaha konstruksi atau 8% dari populasi perusahaan/usaha konstruksi yang ada di Provinsi Bali yang berdasarkan *updating* direktori perusahaan/usaha konstruksi tahun 2011 ada sebanyak 2.068 perusahaan/usaha yang tersebar di 9 (sembilan) kabupaten/kota se-Bali.

IV. KONSEP DAN DEFINISI

1. Konstruksi

Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya. Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, bandara, jaringan listrik dan telekomunikasi, dan lain-lain.

2. Perusahaan

Perusahaan adalah suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri. Badan usaha perusahaan konstruksi dapat berbentuk PT, CV, Firma, PT (Persero), dan Perusahaan Umum.

3. Jaringan Perusahaan Konstruksi

a. Tunggal adalah perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Istilah lain dari perusahaan tunggal adalah perusahaan tanpa cabang.

b. Kantor Pusat/Induk

i. Kantor pusat adalah perusahaan yang mempunyai cabang/perwakilan/unit pembantu di tempat lain, yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang/perwakilan/unit pembantu (divisi).

- ii. Cabang adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang diperbolehkan menjalankan semua jenis kegiatan dari kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri tetapi dalam mengatur usahanya tetap mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat.
- iii. Perwakilan adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang dalam melakukan kegiatannya berdasarkan petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan dan merupakan kepanjangan tangan dari unit kegiatan ekonomi (perusahaan) yang secara struktural berada di atasnya/kantor pusat.
- iv. Unit pembantu (divisi) adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang dalam kegiatannya membantu keperluan unit kegiatan ekonomi yang berada di atasnya, baik kantor pusat, cabang maupun perwakilan. Unit pembantu (divisi) pada umumnya tidak mempunyai kewenangan.

4. Badan Hukum

Badan hukum adalah bentuk pengesahan suatu perusahaan pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah (departemen terkait) yang diperkuat dengan bukti tertulis atau akte.

Bentuk badan hukum terdiri dari:

- a. PT (Persero) adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh negara (pemerintah), dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara, dengan tujuan mencari keuntungan

maksimum dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang ada secara efisien.

- b. Perseroan Terbatas (PT/NV) adalah perusahaan yang berbadan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan pemegang saham bertanggungjawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki. Dalam menjalankan kegiatannya, pemegang saham berperan sesuai besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki, atau berdasarkan perjanjian antar pemegang saham.
- c. Perseroan Komanditer/ Comanditair Venootschap (CV) adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggungjawab penuh atas kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggungjawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.
- d. Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, masing-masing anggota firma bertanggungjawab sepenuhnya atas segala perikatan. Laba yang diperoleh dibagi bersama-sama dan rugi dari perusahaan ditanggung bersama pula.
- e. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas dasar azas kekeluargaan.

- f. Lainnya adalah semua bentuk badan hukum perusahaan yang belum termasuk pada butir a sampai dengan butir e.

5. Kode Identitas Perusahaan (KIP)

Kode Identitas Perusahaan: adalah Kode yang diberikan oleh BPS Pusat secara unik untuk mengidentifikasi perusahaan di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. KIP ini terdiri dari 9 (sembilan) digit dimana digit 1-2 merupakan kode Provinsi, digit 3-4 merupakan kode Kabupaten/Kota dan digit 5-9 merupakan nomor urut perusahaan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

6. Nomor Registrasi Badan Usaha (NRBU)

Nomor Registrasi Badan Usaha: adalah nomor yang ditetapkan oleh LPJK Nasional yang dicantumkan pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai bukti telah dicatatnya Sertifikat didalam Sistem Teknologi Informasi (STI) LPJKN. NRBU ini terdiri dari 17 digit dimana masing-masing digit mempunyai arti tersendiri seperti pada lampiran 1. NRBU ini tetap berlaku sepanjang Badan Usaha tersebut melakukan registrasi ulang dan NRBU ini akan dicabut dan tidak dapat digunakan lagi bilamana Badan Usaha tersebut selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan registrasi ulang.

7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia merupakan klasifikasi baku ekonomi yang terdapat di Indonesia, yang dirinci menurut kategori. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi,

tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal.

8. Kategori

Kategori: Merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit dengan kode alfabet. Dalam KBLI seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori. Kategori-kategori tersebut diberi kode huruf dari A sampai dengan U. Dalam hal ini untuk kategori Konstruksi diberi kode F yang terdiri dari:

a. Konstruksi Gedung (KBLI 2009, 41...)

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum berbagai macam gedung/bangunan, termasuk pembangunan gedung baru, perbaikan gedung, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini juga mencakup konstruksi bangunan tempat tinggal, gedung perkantoran, pertokoan, sarana dan prasarana umum lainnya, termasuk bangunan pertanian dan lain-lain. Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkan sebagian atau seluruhnya.

b. Konstruksi Bangunan Sipil (KBLI 2009, 42...)

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi

yang bersifat sementara. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan konstruksi berat seperti fasilitas industri, proyek infrastruktur dan sarana umum, sistem pembuangan dan irigasi, saluran pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga di tempat terbuka dan lain-lain. Sebagian atau keseluruhan pengerjaan dapat dilakukan atas biaya sendiri, berdasarkan balas jasa/kontrak.

c. Konstruksi Khusus (KBLI 2009, 43...)

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus (yang berhubungan dengan keahlian khusus), biasanya khusus pada satu aspek umum untuk struktur yang berbeda, yang membutuhkan peralatan atau ketrampilan khusus dan lebih banyak dilakukan berdasarkan subkontrak. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyelesaian gedung, instalasi berbagai macam keperluan yang membuat bangunan berfungsi seperti pipa-pipa ledeng, pemanas, pendingin ruangan (AC), sistem alarm dan pekerjaan listrik lainnya, sistem penyiraman, lift dan tangga berjalan dan lain-lain. Termasuk juga kegiatan instalasi dan perbaikan sistem penerangan dan pemberian tanda isyarat untuk jalan raya, rel kereta api, bandar udara, pelabuhan, dan lain-lain. Kegiatan penyelesaian bangunan dan perbaikan meliputi kegiatan yang memberikan kontribusi untuk penyelesaian akhir suatu konstruksi.

9. Sertifikat

Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi sebagai perwujudan hasil registrasi, baik yang berbentuk orang perseorangan maupun badan usaha.

10. Klasifikasi Bidang Pekerjaan

Klasifikasi Bidang Pekerjaan adalah Penggolongan perusahaan konstruksi berdasarkan kemampuan melaksanakan suatu bidang, sub bidang dan bagian sub-bidang pekerjaan konstruksi (bandingkan dengan KBLI 2009). Terdapat 5 jenis klasifikasi bidang pekerjaan dalam sektor Konstruksi yaitu:

- a. **Arsitektur** untuk perusahaan konstruksi yang mampu menangani pekerjaan gedung, seperti pembangunan rumah, ruko, rukan, dan gedung perkantoran;
- b. **Sipil**, untuk perusahaan konstruksi yang mampu menangani pekerjaan sipil, seperti pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, waduk, drainase, dan jaringan pengairan;
- c. **Mekanikal**, untuk perusahaan yang mampu menangani pekerjaan mekanikal, seperti pemasangan mesin pabrik, elevator, eskavator, conveyor dan pekerjaan mekanikal lainnya;
- d. **Kelistrikan/Elektrikal** untuk perusahaan yang mampu menangani pekerjaan listrik, seperti pembangkit tenaga listrik, transmisi dan pekerjaan telekomunikasi.
- e. **Tata Lingkungan**, untuk perusahaan yang mampu menangani pekerjaan eksterior, seperti bangunan pengolahan limbah air bersih dan limbah, perpipaan, reboisasi, dan pengeboran air

tanah.

11. Kualifikasi Perusahaan

Kualifikasi Perusahaan adalah Penggolongan perusahaan konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko, dan/atau kriteria penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya.

Penggolongan **Kualifikasi** ini dapat dibagi atas 7 (tujuh) jenjang kompetensinya dalam Gred, yaitu:

a. B (Besar)

1. **Gred 7:** mempunyai batas nilai satu pekerjaan lebih besar dari Rp. 1 milyar hingga tak terbatas.
2. **Gred 6:** mempunyai batas nilai satu pekerjaan lebih besar dari Rp.1 milyar hingga Rp. 25 milyar.

b. M (Menengah)

- Gred 5:** mempunyai batas nilai satu pekerjaan lebih besar dari Rp. 1 milyar hingga Rp. 10 milyar.

c. K (Kecil)

1. **Gred 4:** mempunyai batas nilai satu pekerjaan maksimum Rp. 1 milyar.
2. **Gred 3:** mempunyai batas nilai satu pekerjaan maksimum Rp. 600 juta.

- d. Gred 2:** mempunyai batas nilai satu pekerjaan maksimum Rp. 300 juta.

e. Perorangan

Gred 1: Usaha orang perseorangan mempunyai batas nilai satu pekerjaan maksimum Rp. 50 juta.

Penggolongan Kualifikasi Perusahaan

No.	Golongan Usaha	Kualifikasi	Keuangan		
			Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) (4)	Kekayaan Bersih (Rp) (5)	Kemampuan sesaat (Seluruh Paket) (Rp) (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Per Orangan	Gred 1	0 sd. 50 juta	Tidak persyaratkan	
2	Kecil	Gred 2	0 sd. 300 juta	50 juta sd. 600 juta	90 juta sd. 1,08 M
3		Gred 3	0 sd. 600 juta	100 juta sd. 800 juta	180 juta sd. 1,44 M
4		Gred 4	0 sd. 1 M	400 juta sd. 1 M	720 juta sd. 1,8 M
5	Menengah	Gred 5	1 M < BNSP ≤ 10 M	1 M sd. 10 M	4,2 M sd. 42 M
6	Besar	Gred 6	1 M < BNSP ≤ 25 M	3 M sd. 25 M	64 M sd. 160 M
7		Gred 7	1 M sd. tak terbatas	10 M sd. Tak terbatas	64 M sd. Tak terbatas

12. Pekerja

Pekerja adalah semua orang yang pada saat pencacahan bekerja di perusahaan, baik pekerja tehnik maupun pekerja non tehnik. Pekerja Tetap dapat dibagi atas pekerja lapangan dan pekerja di kantor. Dalam hal ini pekerja dapat juga di klasifikasikan dengan pekerja yang telah mempunyai sertifikat dan yang tidak mempunyai sertifikat.

- a. Pekerja Tetap** adalah tenaga kerja yang secara administrasi tercatat sebagai pekerja tetap dan biasanya memperoleh gaji bulanan secara tetap dari perusahaan sepanjang tahun.

- b. Pekerja Harian Lepas** adalah pekerja yang proyek konstruksi dikerjakan, dan hanya bekerja selama proyek tersebut masih berjalan. Pekerja ini biasanya dibayar atas dasar upah harian. Contoh: mandor, (kepala tukang), tukang batu, tukang kayu, kenek bangunan, dsb.

Dalam menghitung banyaknya pekerja, termasuk pemilik/pengusaha yang benar-benar aktif dalam menjalankan usahanya.

Pekerja yang sedang cuti tetap dianggap sebagai pekerja pada perusahaan

- c. Pekerja proyek** adalah pekerja yang bertugas menangani bidang pekerja yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional konstruksi di lapangan. Seperti; arsitek, mandor, tukang, dan sebagainya.
- d. Pekerja Kantor Pusat** adalah pekerja yang menangani administrasi, kepegawaian, dan umum yang biasanya bertugas di kantor.
- e. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan tertinggi yang pada saat pencacahan telah diselesaikan/ditamatkan.

13. Balas jasa Pekerja

Balas Jasa pekerja adalah balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam kegiatan usaha, baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa (natura). Balas jasa pekerja yang berbentuk barang/jasa dinilai atas dasar harga pasar pada saat penyerahan barang tersebut.

- a. **Upah/gaji** adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.
- b. **Upah lembur** adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.
- c. **Hadiah, bonus dan sejenisnya** adalah pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja karena prestasi pekerja kepada perusahaan.
- d. **Hadiah** adalah pengeluaran perusahaan berupa uang atau barang yang diberikan kepada pekerja karena prestasi pekerja.
- e. **Bonus** adalah hadiah yang diberikan perusahaan/usaha kepada pekerja dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan mengalami kemajuan atau peningkatan keuntungan yang biasanya dibayarkan setahun sekali.
- f. **Asuransi pekerja** yang dimaksud adalah pengeluaran perusahaan/usaha yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga penyelenggara asuransi atas nama pekerja, yang terdiri dari: asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi jiwa.
- g. **Upah pekerja harian lepas** adalah nilai upah yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja harian lepas yang bekerja pada proyek konstruksi.

13. Sumber Dana Utama

Dana utama pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat bersumber dari beberapa jenis antara lain:

- a. **Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)** adalah modal perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berasal dari sumber keuangan pemerintah pusat (APBN).
- b. **Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi** adalah modal perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berasal dari sumber keuangan pemerintah daerah APBD Provinsi.
- c. **Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota** adalah modal perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berasal dari sumber keuangan pemerintah daerah APBD Kabupaten/Kota.
- d. **Luar Negeri** adalah modal perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berasal dari luar negeri atau warga negara asing baik berupa pinjaman/*loan* maupun berupa hibah.
- e. **Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD)** adalah modal perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berasal dari Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah.
- f. **Sendiri** adalah modal perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berasal dari dana sendiri penyedia jasa.
- g. **Lainnya** adalah modal perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berasal dari dana lainnya seperti dana Swasta Nasional.

14. Pendapatan/Penerimaan

Pendapatan/Penerimaan usaha konstruksi berasal dari nilai pekerjaan konstruksi yang diselesaikan, nilai pemakaian bahan bangunan yang disediakan pemilik pekerjaan, dan pendapatan lain.

15. Nilai pekerjaan konstruksi

Nilai pekerjaan konstruksi adalah nilai proyek dikurangi nilai pekerjaan yang disub-kontrakkan dikalikan realisasi fisik pekerjaan yang diselesaikan.

$$NK = (NP - NS) \times \%NR$$

NK = Nilai pekerjaan konstruksi

NP = Nilai proyek

NS = Nilai pekerjaan yang disub-kontrakkan

%NR = persentase realisasi fisik pekerjaan yang diselesaikan.

%NR didapat dari persentase pekerjaan yang diselesaikan akhir periode survei dikurangi persentase pekerjaan diawal periode survei.

16. Nilai pemakaian bahan bangunan

Nilai pemakaian bahan bangunan yang disediakan pemilik pekerjaan adalah seluruh nilai bahan bangunan yang dipakai untuk setiap proyek selama tahun 2011 yang disediakan pemilik dan dicatat pada pendapatan perusahaan.

17. Nilai dari pendapatan lainnya

Nilai dari pendapatan lainnya adalah pendapat yang diperoleh selain dari pendapatan utama usaha konstruksi, seperti: jasa desain gambar, konsultan, penggunaan modal jasa konstruksi, sewa tanah, sewa bangunan, sewa peralatan konstruksi, sewa alat berat konstruksi, dari bunga, deviden, hak cipta, dan kegiatan lainnya.

18. Pengeluaran usaha

Pengeluaran usaha adalah seluruh jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/pengusaha. Pengeluaran dibedakan menurut biaya khusus dan biaya umum.

Biaya khusus kegiatan konstruksi ditanyakan pada Survei Konstruksi Triwulanan (VKT '2012) dan Survei Konstruksi Tahunan (VKR '2011, sedangkan Biaya umum kegiatan konstruksi hanya ditanyakan pada Survei Konstruksi Tahunan (VKR '2011.)

a. Biaya khusus kegiatan konstruksi

Biaya khusus kegiatan konstruksi adalah pengeluaran yang khusus dan berhubungan langsung terhadap output/konstruksi yang dihasilkan. Biasanya pengeluaran ini mempunyai peran/kontribusi nilai yang paling besar dibandingkan pengeluaran lainnya, biaya khusus dalam konstruksi adalah biaya bahan bangunan yang digunakan selama tahun 2011 oleh setiap proyek.

Biaya bahan bangunan yang digunakan dicatat di pengeluaran adalah biaya bahan bangunan yang disediakan oleh

perusahaan, sedangkan biaya bahan bangunan yang disediakan pemilik dicatat pada pendapatan perusahaan.

b. Biaya Umum kegiatan konstruksi

Biaya umum adalah pengeluaran yang bersifat umum yang tujuannya untuk menunjang pengeluaran langsung/utama. Pengeluaran ini biasanya hampir terjadi di seluruh kegiatan ekonomi. Biaya umum mencakup:

- i. **Alat tulis dan keperluan kantor** adalah biaya semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti kertas, spidol, pensil, tinta printer, karbon, pita mesin tik, map dan kapur.
- ii. **Ongkos pemeliharaan barang modal dan pembelian suku cadang** adalah biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal (gedung dan bangunan, kendaraan bermotor, alat-alat berat, mesin dan peralatan kantor, inventaris kantor lainnya) yang dilakukan baik oleh perusahaan sendiri maupun oleh pihak lain dan bukan dalam rangka pembentukan barang modal.
- iii. **Pos dan telekomunikasi** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan atas penggunaan jasa pos dan telekomunikasi, seperti: pengiriman surat/paket, telepon, telegram dan teleks.
- iv. **Jasa angkutan dan pergudangan** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan atas penggunaan jasa angkutan dan pergudangan, seperti: pengangkutan/pengiriman material

konstruksi dan alat berat konstruksi oleh pihak lain. Tidak termasuk pengangkutan/pengiriman material konstruksi dan alat berat konstruksi oleh kendaraan milik perusahaan karena besarnya nilai bensin/solar sudah tercakup dalam pemakaian bahan bakar.

- v. **Sewa tanah/lahan** adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa tanah yang digunakan untuk usaha konstruksi. Jika sewa tanah/lahan digunakan untuk kegiatan selain usaha konstruksi, maka besarnya sewa untuk tanah/lahan yang dihitung hanya sewa tanah/lahan yang digunakan untuk usaha konstruksi saja, tidak termasuk kegiatan lainnya.
- vi. **Sewa bangunan/gedung** adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa bangunan/gedung yang digunakan untuk usaha konstruksi. Apabila bangunan yang disewa digunakan untuk kegiatan usaha konstruksi dan rumah tangga, maka besarnya sewa untuk bangunan yang dihitung hanya sewa bangunan yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk kegiatan rumah tangga.
- vii. **Sewa alat** adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa alat yang digunakan untuk usaha konstruksi.
- viii. **Asuransi (selain asuransi pekerja)** adalah pengeluaran perusahaan/usaha yang dibayarkan kepada yayasan/lembaga penyelenggara asuransi untuk barang modal yang dimiliki perusahaan, seperti: asuransi kendaraan, peralatan berat, gedung, dan lainnya.

- ix. **Promosi** adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperkenalkan hasil produk perusahaan konstruksi dengan cara-cara yang khas, baik yang dikerjakan sendiri ataupun pihak lain.
 - x. **Air bersih** adalah nilai pemakaian air yang dibeli dari perusahaan air minum/pengelola air minum ataupun pihak lain dan dipergunakan untuk usaha konstruksi.
 - xi. **Bunga atas pinjaman** adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha kepada pihak bank untuk membayar bunga pinjaman perusahaan tersebut kepada pihak bank yang bersangkutan.
 - xii. **Pajak tidak langsung**
 - xiii. **Biaya penelitian dan pengembangan (R & D)**
 - xiv. **Lainnya** adalah biaya yang dikeluarkan selain yang tersebut di atas.
- c. **Bahan Bangunan yang digunakan hanya pada Proyek Utama**
- Bahan Bangunan yang digunakan hanya pada Proyek Utama adalah jumlah biaya bahan bangunan yang digunakan hanya pada Proyek Utama yang dimulai dan diselesaikan pada tahun 2011.

19. Biaya listrik

Biaya listrik adalah nilai seluruh pemakaian listrik untuk penerangan, menjalankan mesin, dan keperluan lainnya yang dibeli dan dipergunakan untuk usaha konstruksi.

20. Biaya bahan bakar dan pelumas

Biaya bahan bakar dan pelumas adalah nilai seluruh pemakaian bahan bakar dan minyak pelumas yang digunakan alat transpor, alat berat konstruksi, peralatan konstruksi, mesin pembangkit listrik, dan lain-lain untuk keperluan perusahaan konstruksi, seperti: bensin, solar, minyak diesel, LPG, gas kota, pelumas, dan minyak tanah.

21. Modal

Modal adalah harta yang digunakan dalam suatu proses produksi (sebagai suatu usaha ekonomi) yang biasa menghasilkan pendapatan.

Modal dibedakan menjadi:

- a. **Modal kerja** adalah modal lancar yang meliputi seluruh uang tunai dan barang-barang produksi/barang dagangan yang digunakan untuk keperluan usaha yang dimiliki atau yang dikelola, seperti: uang tunai dan persediaan barang-barang untuk kegiatan usaha.
- b. **Barang modal** tetap adalah peralatan dan perlengkapan usaha seperti: mesin, kendaraan, tanah, alat-alat berat konstruksi, peralatan konstruksi, gedung, meja, kursi, lemari, dan sebagainya yang pada umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun, digunakan sebagai sarana/alat usaha.

Barang modal tetap dibedakan menjadi:

- i. **Tanah/lahan** adalah lahan yang digunakan untuk usaha.
- ii. **Bangunan** adalah bangunan yang digunakan untuk usaha, bangunan yang digunakan selain untuk usaha konstruksi

(tercampur dengan rumah tangga/usaha lain) maka nilainya tidak perlu diperkirakan.

- iii. **Proyek/peralatan konstruksi** adalah mesin dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi.
- iv. **Kendaraan** adalah alat-alat yang berfungsi untuk mengangkut/memindahkan barang maupun penumpang, bermotor maupun tidak bermotor yang digunakan untuk usaha.
- v. **Barang modal lainnya** adalah barang modal tetap selain yang disebutkan di atas.

c. Barang Modal Menurut Keadaannya

Menurut keadaan barang modal dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- i. **Barang modal baru** adalah barang modal yang belum pernah digunakan di dalam negeri. Barang modal yang pernah digunakan di luar negeri lalu diimpor dan belum pernah digunakan di dalam negeri dikategorikan sebagai barang modal baru.
- ii. **Barang modal bekas** dalam negeri adalah barang modal yang sudah/pernah digunakan di dalam negeri.

Lahan, baik yang telah digunakan ataupun yang belum pernah digunakan dikategorikan sebagai barang modal bekas.

d. Pembuatan/Perbaikan Besar Barang Modal

Menurut pelakunya, pembuatan/perbaikan besar barang modal dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

i. **Pembuatan/perbaikan besar barang modal yang dikerjakan oleh pihak lain** adalah pembuatan/perbaikan yang dapat menambah/menaikkan kapasitas dan umur barang modal dimana pengerjaan serta keperluan bahan-bahan menjadi tanggung jawab pihak lain yang mengerjakan.

ii. **Pembuatan/perbaikan besar barang modal yang dikerjakan sendiri** adalah pembuatan/perbaikan yang dapat menambah/menaikkan kapasitas dan umur barang modal dimana pengerjaan serta keperluan bahan-bahan dilakukan sendiri oleh perusahaan.

e. **Penjualan/pengurangan barang modal bekas** adalah penjualan/pengurangan barang modal yang dimiliki dan pernah dipakai oleh perusahaan ini kemudian dijual kepada pihak lain.

f. **Penyusutan nilai barang modal tetap** adalah pengurangan nilai suatu barang modal disebabkan karena pemakaian atau waktu, yang dinilai setiap tahun sehingga pada suatu saat tertentu nilai bukannya menjadi nol.

g. Penilaian Barang Modal Tetap

i. **Barang modal tetap** dinilai berdasarkan pembelian yang sesungguhnya pada saat terjadi transaksi/frangko gudang (*at delivered price*), termasuk ongkos pemasangan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pembelian seperti komisi

dan pajak, sampai dengan barang modal tersebut siap digunakan (ready for use) oleh pemesan. Barang modal tetap yang diperoleh dari hibah dihitung/dicatat berdasarkan harga pasar.

ii. **Nilai barang modal** adalah nilai kumulatif atas adanya efek penambahan atau pengurangan nilai barang modal.

iii. **Catatan**

- a) Untuk barang modal yang pembuatannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun seperti pembangunan gedung, maka nilai yang dicatat hanya nilai yang benar-benar telah diinvestasikan selama referensi waktu survei.
- b) Barang modal hasil produksi sendiri dinilai menurut harga pasar. Bila harga pasar untuk barang modal tersebut tidak tersedia, maka penilaiannya berdasarkan seluruh biaya yang telah dikeluarkan termasuk nilai tenaga kerja sendiri. Contoh: Pembangunan gedung kantor perusahaan konstruksi yang dikerjakan sendiri oleh perusahaan tersebut merupakan barang modal hasil produksi sendiri.
- c) Barang modal yang dibeli secara kredit dinilai berdasarkan harga pasar pada saat barang modal tersebut siap digunakan, termasuk biaya yang dikeluarkan berhubungan pemasangan barang modal dilokasi produksi. Bunga yang dikeluarkan perusahaan/usaha atas kredit barang modal ini tidak perlu dimasukkan kedalam nilai barang modal tersebut.

- d) Barang modal tetap yang terbakar/hilang adalah merupakan pengurangan barang modal tetap dan penilaiannya berdasarkan nilai transaksi yang terjadi apabila barang modal tersebut dijual.
- e) Apabila perusahaan mengangkut sendiri barang modal yang dibelinya maka pengeluarannya untuk pengangkutan tersebut dimasukkan sebagai pengeluaran barang modal.

V. METODE PENGUMPULAN DATA

Survei tahunan perusahaan/Usaha konstruksi dilakukan oleh staf kabupaten/kota atau kecamatan di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Pencacahan (pengumpulan) datanya dilakukan berdasarkan sampel yang ditentukan oleh BPS RI dalam bentuk VK10-DSU.VK, yaitu Daftar Sampel Utama yang harus dicacah dengan dokumen Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan 2011 (VKR-2011). Disamping itu BPS RI juga menyiapkan VK11-DSP.PK yaitu Daftar Sampel Pengganti yang memuat daftar perusahaan pengganti sampel utama jika daftar sampel utama tidak dapat dicacah.

VI. ULASAN

6.1 Jumlah Perusahaan

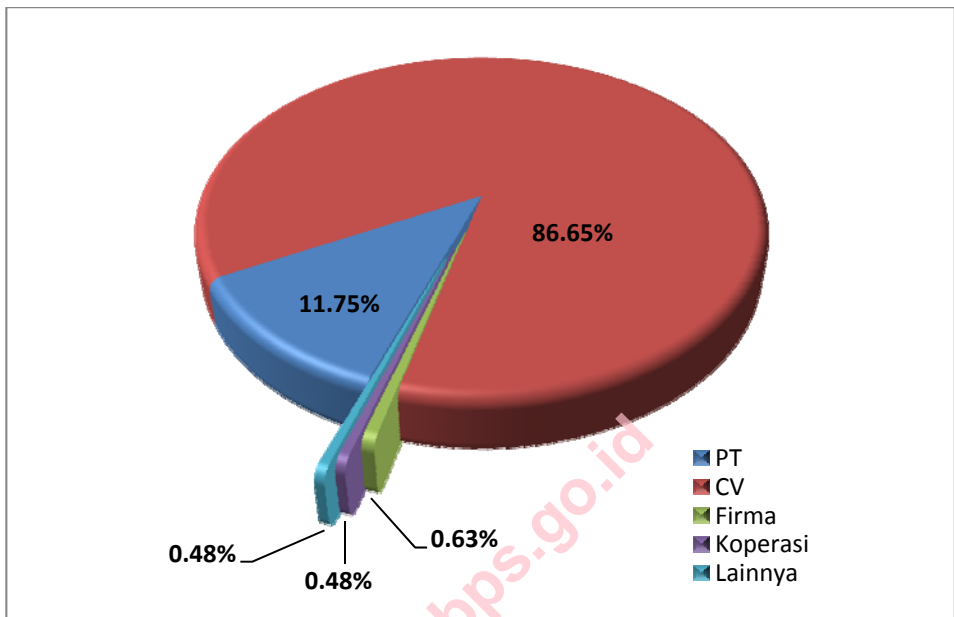
Jumlah Perusahaan/Usaha Sektor konstruksi di Provinsi Bali berdasarkan updating direktori perusahaan/usaha konstruksi tahun 2011 adalah sebanyak 2.068 perusahaan/usaha yang tersebar di 9 (sembilan) kabupaten/kota. Angka ini mengalami kenaikan sebanyak 293 perusahaan (16,50%) jika dibandingkan dengan direktori perusahaan/usaha konstruksi tahun 2010. Tahun 2011 sampel perusahaan/usaha konstruksi tahunan yang dicacah sebanyak 152 perusahaan berkurang 23 perusahaan (15,13%) dibanding dengan tahun 2010 sebanyak 175 perusahaan.

Perusahaan/usaha sektor konstruksi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seperti tersaji dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Menurut Bentuk Badan Hukum Provinsi Bali Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Bentuk Badan Hukum					Jumlah
		PT	CV	Firma	Koperasi	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jembrana	10	99				109
2	Tabanan	14	146				160
3	Badung	40	191				231
4	Gianyar	14	223	3	2	1	243
5	Klungkung	7	175	2	1		185
6	Bangli	12	199	1	3		215
7	Karangasem	13	254		2		269
8	Buleleng	16	208	5		6	235
9	Denpasar	117	297	2	2	3	421
	Bali	243	1.792	13	10	10	2.068

Grafik 1. Persentase Populasi Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Menurut Bentuk Badan Hukumnya Tahun 2011



Pada tabel 1 terlihat perusahaan/usaha konstruksi terbanyak terdapat di Kota Denpasar yaitu sebanyak 421 perusahaan (20,35%). Hal ini karena kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali sehingga menjadi pusat kegiatan ekonomi sehingga permintaan untuk membangun fisik di sektor konstruksi sangat tinggi. Sedangkan Kabupaten Jembrana adalah kabupaten dengan jumlah perusahaan/usaha konstruksi yang terkecil yaitu sebanyak 109 perusahaan (5,27%).

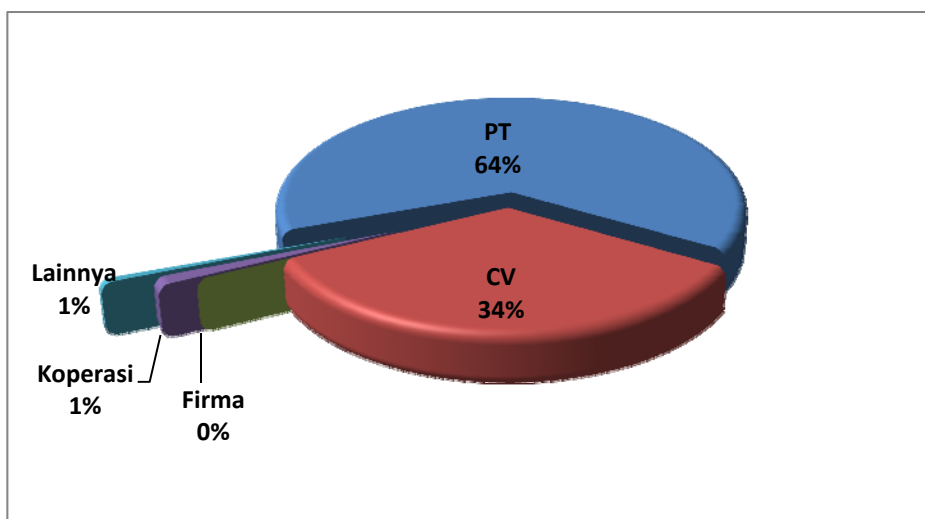
Sampel perusahaan/usaha konstruksi tahun 2011 yang terbesar adalah kota Denpasar sesuai dengan populasinya yang sangat tinggi dibandingkan kabupaten lainnya yaitu sebanyak 66 perusahaan (43,42%) dari jumlah sampel yang 152 perusahaan. Sampel terkecil adalah kabupaten Klungkung dan kabupaten Bangli masing-masing sebanyak 7

perusahaan (4,60%), sedangkan di tahun 2011 mengalami penurunan sampel sebanyak 23 perusahaan (13,14%) yaitu dari 175 menjadi 152 perusahaan. Hal ini terlihat pada tabel 2 di bawah ini:

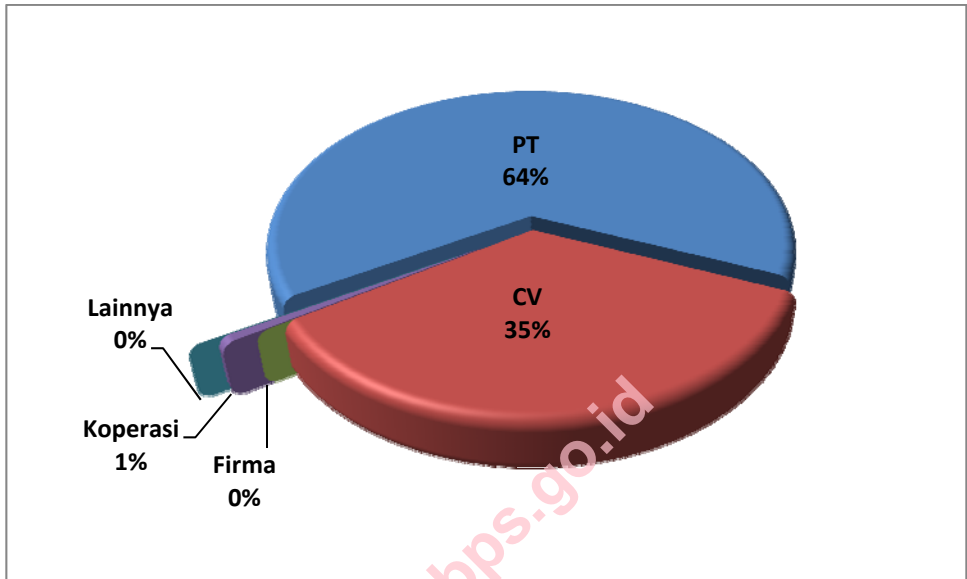
Tabel 2. Jumlah Sampel Perusahaan/Usaha sektor Konstruksi Menurut Bentuk Badan Hukum Provinsi Bali Tahun 2010 dan 2011

No	Kabupaten/Kot	Bentuk Badan Hukum					Jumlah
		PT	CV	Firma	Koperasi	Lainnya	
1	Jembrana	3	3				6
2	Tabanan	6	6				12
3	Badung	10	7				17
4	Gianyar	7	5		1		13
5	Klungkung	2	5				7
6	Bangli	2	5				7
7	Karangasem	6	5				11
8	Buleleng	6	7				13
9	Denpasar	56	10				66
Bali 2011		98	53	0	1	0	152
Bali 2010		112	60	0	2	1	175

Grafik 2. Sampel Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Menurut Bentuk Badan Hukum Tahun 2010



Grafik 3. Sampel Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Menurut Bentuk Badan Hukum Tahun 2011



6.2 Bentuk Badan Hukum

Bentuk badan hukum perusahaan/usaha konstruksi adalah PT, CV, Firma, Koperasi dan lainnya. Untuk Provinsi Bali tahun 2011 direktori perusahaan/usaha konstruksi bentuk badan hukum yang banyak adalah CV yaitu sebanyak 1792 perusahaan (86,65%) dan yang paling sedikit adalah koperasi yaitu 10 perusahaan (0,01%). Tetapi untuk sampel pencacahan 2011 yang terbesar adalah PT yaitu sebanyak 98 perusahaan (64,47%) dan yang terkecil adalah koperasi atau 0,01 %. Hal ini terlihat pada grafik 1 , 2 dan 3.

6.3 Bidang Pekerjaan Utama

Jenis-jenis bidang pekerjaan utama perusahaan/usaha sektor konstruksi adalah Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan. Pada Tabel 3 dibawah ini terlihat untuk sampel tahun 2011 perusahaan/usaha konstruksi yang bergerak di bidang sipil yang terbanyak sebagai sampel yaitu sebanyak 88 perusahaan (67,89%) dan di bidang khusus yang paling sedikit yaitu 15 perusahaan (5,71%).

Tabel 3. Bidang Pekerjaan Utama Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Provinsi Bali Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Gedung	Sipil	Khusus	Jumlah
1	Jembrana	1	5		6
2	Tabanan	2	10		12
3	Badung	9	7	1	17
4	Gianyar	4	9		13
5	Klungkung	2	5		7
6	Bangli	1	4	2	7
7	Karangasem	5	6		11
8	Buleleng	3	9	1	13
9	Denpasar	22	33	11	66
	Bali 2011	49	88	15	152

6.4 Kualifikasi Golongan dari Bidang Pekerjaan Utama

Kualifikasi golongan perusahaan/usaha konstruksi terbagi atas golongan kecil dengan Gred 2 s.d 4, Golongan menengah dengan Gred 5 dan Golongan Besar dengan Gred 6 s.d Gred 7. Berdasarkan Alokasi sampel yang berhasil didata golongan kecil dan menengah berada di seluruh kabupaten/Kota sedangkan sampel perusahaan/usaha konstruksi golongan besar berada pada kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem, Buleleng dan Kota Denpasar. Sampel terkecil ada pada golongan Besar yaitu Gred 6 dan Gred 7 sebanyak 5 perusahaan dan golongan Menengah yaitu Gred 5 sebanyak 60 perusahaan. Datanya dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Kualifikasi Golongan dari Bidang Pekerjaan Utama Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Provinsi Bali tahun 2010 dan 2011

No	Kabupaten /Kota	Kualifikasi Golongan Bidang Pekerjaan Utama			Jumlah
		Gred 2- 4	Gred 5	Gred 6 dan 7	
1	Jembrana	5	1		6
2	Tabanan	7	5		12
3	Badung	13	4		17
4	Gianyar	7	6		13
5	Klungkun	6	1		7
6	Bangli	7			7
7	Karangas	9	2		11
8	Buleleng	8	5		13
9	Denpasar	25	36	5	66
Bali 2011		87	60	5	152
Bali 2010		70	75	20	175

6.5 Tenaga Kerja

Tenaga kerja tetap yang terserap untuk sektor konstruksi adalah sebanyak 1565 orang yang terdiri dari 1282 tenaga laki-laki dan 283 tenaga perempuan menurut sampel perusahaan/usaha sektor konstruksi 2011. Kota Denpasar adalah yang paling tinggi dalam penyerapan tenaga kerja tetap yaitu sebanyak 1066 orang (68,11%) yang terdiri dari 895 orang tenaga laki-laki dan 171 orang tenaga perempuan sedangkan penyerapan tenaga kerja tetap terkecil terdapat di kabupaten Bangli sebanyak 15 orang (0,65%). Hal ini disebabkan karena sedikitnya proyek yang dikerjakan di kabupaten Bangli pada tahun 2011. Dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Jumlah tenaga kerja tetap menurut jenis kelamin pada perusahaan/usaha sektor konstruksi Provinsi Bali 2011

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jembrana	10	6	16
2	Tabanan	61	17	78
3	Badung	145	44	189
4	Gianyar	99	20	119
5	Klungkung	15	4	19
6	Bangli	14	1	15
7	Karangasem	19	6	25
8	Buleleng	24	14	38
9	Denpasar	895	171	1066
Bali 2011		1282	283	1565

6.6 Pengeluaran Perusahaan

Pengeluaran untuk pekerja adalah semua pengeluaran perusahaan untuk pekerja yaitu upah/gaji, upah lembur, hadiah, bonus, dana pensiun, tunjangan kecelakaan dan pengeluaran lainnya yang dibayarkan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang.

Biaya input atau biaya pengeluaran perusahaan/usaha sektor konstruksi Provinsi Bali tahun 2011 sebesar 250,81 milyar dan diurut menurut jenis pengeluarannya adalah pengeluaran balas jasa pekerja tetap sebesar 58,97 milyar, pembelian bahan bangunan sebesar 155,85 milyar, pemakaian tenaga listrik sebesar 0,80 milyar, pemakaian bahan bakar sebesar 3,16 milyar dan biaya pengeluaran lainnya sebesar 32,03 milyar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Pengeluaran Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Menurut Jenisnya Provinsi Bali tahun 2011 (000 Rp)

No	Kabupaten/ Kota	Nilai Pengeluaran					Jumlah
		Balas Jasa Pekerjaan Tetap	Pemakaian Bahan Bangunan yang Digunakan	Pemakaian Tenaga Listrik yang dibeli	Pemakaian Bahan Bakar	Biaya Pengeluaran Lain	
1	Jembrana	262.200	279.600	5.880	14.353	64.011	626.044
2	Tabanan	5.643.402	7.896.568	31.899	226.531	1.822.330	15.620.730
3	Badung	2.725.031	8.861.675	54.941	182.155	483.840	12.307.642
4	Gianyar	988.295	1.555.851	30.760	21.823	155.754	2.752.483
5	Klungkung	352.155	419.336	5.990	8.866	27.805	814.152
6	Bangli	358.137	836.358	5.640	45.189	169.826	1.415.150
7	Karangasem	1.263.122	5.675.959	73.613	599.145	947.375	8.559.214
8	Buleleng	550.841	2.946.791	13.247	308.157	289.327	4.108.363
9	Denpasar	46.831.022	127.375.529	574.835	1.753.254	28.067.588	204.602.228
Bali 2011		58.974.205	155.847.667	796.805	3.159.473	32.027.856	250.806.006

6.7 Pendapatan Perusahaan

Nilai output atau nilai pendapatan perusahaan/usaha sektor konstruksi Provinsi Bali tahun 2011 adalah nilai dari pekerjaan konstruksi, nilai pemakaian bahan bangunan yang disediakan pemilik pekerjaan dan nilai dari pendapatan lainnya. Hasil survei perusahaan/usaha sektor konstruksi Provinsi Bali tahun 2011 total pendapatan sebesar 310,43 milyar. Kota Denpasar menempati ranking tertinggi yaitu sebesar 254,65 milyar atau (82,03%) dari seluruh total kabupaten/kota se-Bali. Sedangkan kabupaten/kota yang pendapatannya terendah adalah kabupaten Klungkung sebesar 0,90 milyar atau (0,001%). Hal ini dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Pendapatan Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Menurut Jenisnya Provinsi Bali tahun 2011 (000 Rp)

No	Kabupaten/ Kota	Nilai Pendapatan			
		Nilai Pekerjaan Konstruksi	Bahan bangunan yang disediakan Pemilik pekerjaan	Nilai dari Pendapatan Lain	Jumlah
1	Jembrana	466.000	0	187.965	653.965
2	Tabanan	16.401.833	0	521.525	16.923.358
3	Badung	13.941.390	1	413.084	14.354.474
4	Gianyar	3.074.059	0	2.421	3.076.480
5	Klungkung	758.929	0	137.600	896.529
6	Bangli	1.672.681	0	91.000	1.763.681
7	Karangasem	0	0	11.981.285	11.981.285
8	Buleleng	6.024.917	1	100.544	6.125.461
9	Denpasar	229.223.585	2	25.430.661	254.654.246
	Bali 2011	271.563.394	4	38.866.085	310.429.479

6.8 Efisiensi Perusahaan

Efisiensi Perusahaan merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.”

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$$

- ❖ Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- ❖ Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Dalam sampel survei perusahaan konstruksi tahun 2011 kita dapat melihat kabupaten/kota yang paling tinggi efisiensi perusahaan/ usaha sektor konstruksi 2011 diatas 20 % adalah Kabupaten Bangli sebesar 124,62 %, Kabupaten Karangasem 139,98 %, Kabupaten Buleleng sebesar 149,09 % dan Kota Denpasar sebesar 124,46 % Sedangkan kabupten/kota yang tingkat efisiensi perusahaan berada dibawah 20 % yang terkecil adalah kabupaten Jembrana sebesar 104,45%, Kabupaten Tabanan 108,33 %, Kabupaten Badung 116,63 %,

Kabupaten Gianyar 111,77 % dan Kabupaten Klungkung 110,11 %, Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. Tingkat Efisiensi Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Provinsi Bali Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Nilai (000 Rp)		Efisiensi Perusahaan
		Pendapatan	Pengeluaran	
1	Jembrana	653.965	626.044	104,45
2	Tabanan	16.923.358	15.620.730	108,33
3	Badung	14.354.474	12.307.642	116,63
4	Gianyar	3.076.480	2.752.483	111,77
5	Klungkung	896.529	814.152	110,11
6	Bangli	1.763.681	1.415.150	124,62
7	Karangasem	11.981.285	8.559.214	139,98
8	Buleleng	6.125.461	4.108.363	149,09
9	Denpasar	254.654.246	204.602.228	124,46
Bali 2011		310.429.479	250.806.006	123,77

6.9 Persentase Keuntungan Perusahaan

Keuntungan perusahaan adalah perbandingan antara nilai pendapatan dengan nilai pengeluaran perusahaan/usaha sektor konstruksi 2011. dari hasil survei perusahaan konstruksi tahun 2011 dapat dilihat kabupaten/kota yang memiliki keuntungan perusahaan yang paling tinggi disektor konstruksi adalah Kabupaten Buleleng sebesar 49,09 persen sedangkan yang terkecil Kabupaten Jembrana sebesar 4,45 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9. Persentase Keuntungan Terhadap Pengeluaran Perusahaan/Usaha Sektor Konstruksi Provinsi Bali 2011

No	Kabupaten/Kota	Nilai		Persentase Keuntungan
		Pendapatan	Pengeluaran	
1	Jembrana	653.965	626.044	4,45
2	Tabanan	16.923.358	15.620.730	8,33
3	Badung	14.354.474	12.307.642	16,63
4	Gianyar	3.076.480	2.752.483	11,77
5	Klungkung	896.529	814.152	10,11
6	Bangli	1.763.681	1.415.150	24,62
7	Karangasem	11.981.285	8.559.214	39,98
8	Buleleng	6.125.461	4.108.363	49,09
9	Denpasar	254.654.246	204.602.228	24,46
Bali 2011		310.429.479	250.806.006	23,77

DATA

Mencerdaskan Bangsa



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

JL. Raya Puputan No. 1 Renon, Denpasar

Telp.: 0361-238159 FAX: 0361-238162

Web: <http://bali.bps.go.id>

Email: bps5100@bps.go.id